

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Kesempatan Politik (*Political Opportunity*)

Istilah *Political Opportunity Approach* (Pendekatan peluang/Kesempatan Politik) biasa dikenal dengan istilah *Political Opportunity Structure* (Struktur peluang/Kesempatan Politik) atau *The Political Process Theory* (Teori Proses Politik). Teori Proses Politik tentang *Social Movements* (Gerakan Sosial) pertama kali dirumuskan oleh Douglas McAdam pada tahun 1982 pada sebuah buku yang berjudul "*Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970*"

Eisinger (dalam Wahlstrom & Peterson, 2006: 364), memperkenalkan konsep tentang Struktur Peluang Politik (*the Political Opportunity Structure/POS*), dimana dewasa ini konsep mengenai Struktur Peluang Politik (*the Political Opportunity Structure*) tersebut sering digunakan oleh McAdam (1982) dan Tarrow (1994). POS merupakan suatu ekspresi yang bertujuan melakukan analisa tentang keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan sosial. Para ilmuwan menggunakan konsep terkait POS dan dapat diterapkan secara umum dalam menganalisis gerakan pada konteks karakteristik lokal. Suatu struktur adalah spesifik, setiap lokasi berbeda dan bervariasi dari waktu ke waktu.

McAdam (Locher, 2002:265), berpendapat bahwa ada tiga faktor determinan yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan social, yakni: (1) *organization strength*; (2) *cognitive liberation*; dan (3) *political opportunities*.

Pertama, *Organization strength*, yakni level (tingkat kondisi) organisasi dalam masyarakat yang merasa dirugikan. Semakin terorganisir suatu kelompok orang-orang, maka akan semakin besar kemungkinan berhasilnya suatu gerakan sosial. Seperti halnya dalam *Resource Mobilization Theory*, McAdam melalui *Political Process Theory*-nya juga mencatat pentingnya kehadiran organisasi untuk membentuk gerakan sosial. Keberadaan suatu organisasi, apapun jenisnya, akan membangun struktur *solidarity incentive*, jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Selanjutnya McAdam berpendapat bahwa keberadaan suatu kelompok sosial akan memungkinkan munculnya motivasi sosial dan antar-personal untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kelompok bersama anggota yang lainnya. Anggota kelompok yang tidak mau bergabung dalam suatu gerakan bersama dengan yang lainnya akan merasa bersalah dan mungkin akan mendapatkan hukuman secara sosial. Sementara jika mereka ikut bergabung maka akan mendapatkan keuntungan secara social dan akan merasa semakin memiliki kedekatan dengan anggota yang lainnya.

Menurut Porta dan Diani (2006:140), dalam analisis tentang gerakan sosial, kajian tentang organisasi gerakan social (*social movement organization/SMO*) merupakan kajian yang cukup populer. Meskipun para ahli memberikan pengertian yang cukup bervariasi tentang organisasi gerakan sosial, namun secara umum dapat

dikatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi identitas yang bersifat kompleks atau formal, dengan tujuan mencapai tujuan mereka yang diimplementasikan dalam suatu gerakan sosial atau kontra gerakan sosial. Sementara definisi yang lainnya, menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial sebagai asosiasi orang-orang yang melakukan tuntutan moral dan ideal tentang bagaimana seharusnya kehidupan personal atau kelompok yang termarginalkan dari masyarakatnya diorganisasikan.

Kedua, *Cognitive liberation*, yakni persepsi tentang peluang keberhasilan dalam masyarakat. Semakin percaya bahwa mereka bisa berhasil, maka semakin besar mereka untuk mencoba terlibat dalam melakukan gerakan sosial. *Cognitive Liberation*, merupakan konsep yang sederhana. Sebelum orang-orang ikut mengambil bagian dalam suatu gerakan, para anggota potensial harus mengembangkan ide bahwa suatu situasi dipandang tidak adil dan kondisi ini dapat diubah melalui suatu tindakan kolektif. Dalam kata lain, mereka harus mengembangkan perasaan suatu deprivasi relatif, yakin bahwa deprivasi ini salah, memutuskan bahwa tujuan mereka adalah benar, dan yakin bahwa solusi atas problem mereka adalah bersifat struktural. Sebenarnya McAdam tidak pernah menggunakan kata *relative deprivation*, akan tetapi gagasannya memiliki kesamaan. Sebelum suatu gerakan dapat dimulai, terlebih dahulu harus ada kelompok dimana para anggotanya mempunyai keinginan dan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari tindakan bersama.

Ketiga, *Political opportunities*. Ada dua konsep dalam *political opportunities*, yakni: (a) *Political opportunities*, yakni keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu kelompok dapat bersatu dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu system politik. *Political Opportunity* merupakan aspek yang sangat penting dibandingkan dengan dua faktor yang lainnya. Organisasi-organisasi gerakan, harus memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang signifikan. Adanya perubahan dalam suatu sistem, akan memungkinkan untuk munculnya sebuah gerakan sosial, dan (b) *The Social System*, untuk dapat bertahan hidup, maka gerakan sosial harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat.

McAdam menyebutkan terdapat empat dimensi dari *political opportunity* yang memiliki hubungan langsung dengan sistem sosial dimana gerakan eksis (Locher, 2002:267; McAdam, McCarthy, & Zald, 2004:27), yakni: (1) Relatif terbuka atau tertutupnya suatu kelembagaan sistem politik, (2) Stabil atau tidak stabilnya dari berbagai hubungan antar-kelompok yang berkuasa, (3) Ada atau tidak adanya persekutuan antara kekuatan-kekuatan (elit) dalam masyarakat, dan (4) Kapasitas dan kecenderungan Negara untuk melakukan tindakan refresif. Masing-masing faktor secara langsung menentukan seberapa besar kesempatan politik yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial. Agar berhasil, maka suatu gerakan harus ada dalam situasi dan tempat dimana faktor-faktor tersebut mendukung.

Dalam menjelaskan peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan, Sydney Tarrow (dalam McAdam, McCarthy, & Zald, 2004: 41-44) berpendapat bahwa secara umum terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui peluang-peluang politik yang memicu munculnya gerakan-gerakan sosial, yakni: (1) *Proximate opportunity structure*; dan (2) *State centered opportunity structure*. Pertama, *Proximate opportunity structure* Pendekatan ini menekankan pada tanda/signal yang diterima dari kebijakan-kebijakan di lingkungan masyarakat atau dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumber daya dan kapasitas masyarakat. Secara khusus pendekatan ini dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu: (1) *Policy specific opportunities*, yang berpandangan bahwa peluang atau kesempatan politik bagi lahirnya suatu gerakan sosial bisa muncul oleh karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik.

Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial. Peluang politik juga bisa muncul sebagai akibat dari legitimasi pemerintah yang semakin merosot, atau bahkan karena legitimasi Negara tidak diakui oleh masyarakat, dan (2) *Group-specific opportunities*, Pendekatan ini melihat struktur peluang-peluang yang terfokus pada perubahan-perubahan yang terjadi atau dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, baik tujuan ataupun keberadaannya di masyarakat. Perubahan-perubahan ini juga dapat memicu munculnya aksi kolektif. Adapun penyebab terjadinya perubahan-perubahan tersebut

bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor, seperti: politik, ekonomi, ideologi, budaya, perang, dsb.

Kedua, *State centered opportunity structure* Pendekatan ini memfokuskan pada negara dan segala aspek di dalamnya yang merupakan sumber terjadinya peluang-peluang yang bisa digunakan untuk memunculkan aksi kolektif. Secara khusus terdapat dua tipe dari *State centered opportunity structure*, yaitu: (1) *Cross-sectional statism*, Dalam pendekatan ini negara dianggap sebagai arena persaingan antara berbagai kelas sosial. Status dan terjadinya konflik-konflik politik., dan (2) *Dynamic statism*, yang memfokuskan kepada bagaimana perubahan negara dan bagaimana perubahan negara ini memproduksi atau mengurangi peluang-peluang politik.

Pendekatan ini menyoroti pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu negara dan pengaruhnya pada aktor-aktor gerakan sosial. Seluruh sistem politik menurut Tarrow (McAdam, McCarthy, & Zald, 2004: 40-45) mengalami perubahan yang pada gilirannya akan mengubah lingkungan aktor-aktor sosial yang cukup kuat untuk mempengaruhi langkah awal, bentuk-bentuk, dan hasil-hasil dari tindakan kolektif.

2. Konsep Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*)

Didalam kajian mengenai gerakan sosial tentunya terdapat beberapa penjelasan mengenai kajian teoritis dan juga pendekatan yang bisa kita dalami dalam memahami ataupun menganalisis bagaimana suatu gerakan sosial terjadi. Menurut

Singh (2010), dalam perkembangannya terdapat beberapa kategori kajian gerakan sosial yaitu gerakan sosial klasik, neo-klasik, dan gerakan sosial baru.

Didalam tradisi klasik gerakan sosial dipengaruhi oleh para psikolog sosial Barat dan para sejarawan sebelum tahun 1950-an yang meliputi sebagian besar studi-studi didalam perilaku kolektif masyarakat baik berupa kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*riot*), dan penolakan (*rebel*). Sedangkan pada tradisi neo-klasik gerakan sosial mulai berkembang setelah tahun 1950-an dan dibagi kedalam dua model gerakan sosial lama, yaitu gerakan sosial lama fungsional dan dialektika Marxis. Dan untuk gerakan sosial baru atau disebut dengan gerakan sosial kontemporer berkembang sekitar tahun 1960-an dan 1970-an. Di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika gerakan sosial baru ini mencakup pada aspek-aspek humanis (*humanist*), kultural (*cultural*), dan non materialistik (*non-materialistic*) yang pada intinya tujuan gerakan sosial baru ini secara esensial mengacu pada tujuan-tujuan yang bersifat universal dan diarahkan pada tujuan guna memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. (Oman, 2016:9).

Mengacu pada pemahaman para teoritis Gerakan Sosial Baru secara eksplisit menurut cara pandang mereka, GSB ini mencakup tentang logika dari tindakan yang berbasis politik, ideologi dan kultur sebagai akar dari tindakan-tindakan kolektif, dan juga sumber-sumber lainnya tentang identitas, etnisitas, gender, dan seks yang dimaknai kedalam tindakan kolektif. Dengan demikian Gerakan Sosial Baru (GSB) ini memiliki suatu terminologi tindakan kolektif tersendiri dari konsep Gerakan

Sosial Lama tentang revolusi proletarian dan berhubungan dengan teori Marxisme Klasik. Walaupun disatu sisi GSB ini menolak atau mengkritik dari konsep teori Marxisme Klasik pada Gerakan Sosial Lama namun secara sederhananya GSB ini lebih ke berusaha untuk meng-*update*, merevisi dan menuju perubahan asumsi-asumsi dari Marxis Klasik tersebut. (Buechler, 1995:442) (dalam Oman, 2016:118).

a) Struktur Mobilisasi

Teori pendekatan Struktur Mobilisasi merupakan suatu mekanisme alternatif yang populer dalam menjelaskan suatu gerakan sosial yang terjadi didalam masyarakat. Dengan struktur mobilisasi menjelaskan bahwa sebuah sistem politik yang dijalankan pada unsur kelembagaan seperti negara, pemerintah, dan juga lembaga di tingkat lokal akan memunculkan suatu prospek dalam membangun aksi-aksi kolektif dan kategori dalam sebuah gerakan.

Menurut McCarthy dalam Situmorang (2007:7) menyebutkan bahwa struktur mobilisasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh kelompok gerakan sosial dalam membentuk aksi kolektif dengan suatu taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. Begitupun dalam pelaksanaannya struktur mobilisasi ini bisa dilakukan dalam bentuk aksi kolektif informal maupun formal. Wolifer dalam Situmorang (2007:8) menjelaskan berkembangnya konsep struktur informal yang didasarkan oleh faktor keberadaan suatu komunitas. Kemudian Gamson dan Schmeidler menjelaskan beberapa faktor pendukung dalam struktur mobilisasi informal yaitu atas dasar perbedaan dalam sub-kultur dan infrastruktur protes pada suatu permasalahan.

Menurut Edwards dan McCarthy (Snow, Soule, & Kriesi, 2004:125-128) (dalam Oman, 2016:168) menyebutkan bahwa dalam konsep mobilisasi sumberdaya terdapat beberapa model diantaranya:

Pertama, mobilisasi sumber daya moral yang meliputi legitimasi, dukungan simpati, dukungan solidaritas, dan dukungan orang-orang atau tokoh-tokoh publik. *Kedua*, mobilisasi sumberdaya kultural yang merupakan seperangkat konseptual produk budaya dan pengetahuan khusus. Konsep produk budaya tersebut meliputi produksi gerakan atau isu-isu penting seperti musik, literatur, majalah, film dan video. *Ketiga*, mobilisasi sumberdaya organisasi sosial yang meliputi organisasi sosial yang disengaja maupun organisasi sepadan. Organisasi disengaja merupakan organisasi yang dibentuk secara khusus dengan maksud untuk tujuan gerakan sosial lebih lanjut. Organisasi sepadan merupakan organ yang dibentuk bukan atas dasar tujuan gerakan tetapi aktor-aktor gerakan dapat mengakses sumberdaya melalui organ ini. *Keempat*, mobilisasi sumberdaya manusia meliputi sumber-sumber seperti: tenaga kerja, pengamanan, keterampilan dan keahlian. *Kelima*, mobilisasi sumberdaya material merupakan konsep sumberdaya yang memiliki sumber-sumber seperti: moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan perbekalan.

b) Framing

Mekanisme *framing* merupakan suatu mekanisme lanjutan dari struktur mobilisasi dalam gerakan sosial. Karena pada pelaksanaannya struktur mobilisasi memiliki suatu persoalan yang menjadi kelemahan dalam menafsirkan sebuah fenomena munculnya gerakan sosial. Menurut Rucht dalam Situmorang (2007:9),

struktur mobilisasi seringkali terlalu kompleks dalam menafsirkan suatu fenomena gerakan dan lebih menjelaskan bagaimana tingkatan dan cakupan analisis dari suatu gerakan sosial.

Maka dari itu proses *framing* sangatlah penting dalam memahami mekanisme gerakan sosial secara lebih terbuka sehingga orang lain akan memahami bagaimana suatu pencapaian yang dilakukan oleh aktor gerakan sosial dalam melakukan suatu tindakan kolektif. Snow dan Benford dalam Situmorang (2007:10) menekankan dua hal penting dalam mem*framing* suatu gerakan, diantaranya yaitu, mampu mendefinisikan masalah dan sumbernya berdasarkan sebab akibat dan juga sekaligus mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut.

Dalam mekanisme *framing*, aktor gerakan mempunyai tugas inti bagaimana mereka mampu untuk mengartikulasikan suatu gerakan yang dilakukan terhadap kebijaksanaan publik. Menurut Zald beberapa hal penting dalam pembentukan suatu *framing* yaitu, topik mengenai kontradiksi budaya dan alur sejarah. Menurutnya ketegangan budaya dan kontradiksi seperti ketidakadilan dan keluhan menjadi satu hal yang sangat penting dalam pembentukan dan proses *framing* gerakan. Kemudian yang kedua yaitu proses *framing* sebagai sebuah aktivitas strategi dimana kontradiksi budaya yang terjadi menjadi suatu konteks dan kesempatan bagi aktor-aktor gerakan. Selain itu juga pendefinisian terhadap ideologi, simbol, peristiwa-peristiwa menjadi bahan kajian bagi para aktor dalam memilih strategi *framing* yang akan dilakukan dalam gerakan sosial.

Untuk mencapai sebuah kelompok sasaran dari suatu gerakan maka aktor gerakan membutuhkan suatu alat yang bisa digunakan dalam melakukan *framing* terhadap suatu isu permasalahan yang diangkat dalam gerakan tersebut. Salah satu alat dari proses *framing* suatu gerakan yaitu media. Menurut Zald dalam Situmorang (2007:12) menyebutkan bahwa pelaksanaan *framing* terjadi pada interaksi-interaksi yang dilakukan melalui beragam media cetak dan elektronik seperti buku, pamflet, majalah, dll. Aktor dari gerakan sosial pun menggunakan ruang-ruang masyarakat atau publik seperti warung, café, pasar, dll dalam menyampaikan atau menginteraksikan setiap permasalahan yang jadi fokus pembahasan, sehingga kelompok masyarakat berkeinginan untuk terlibat secara langsung dalam gerakan sosial tersebut. Namun dalam prosesnya tidak hanya media yang menjadi alat dalam upaya *framing*, upaya secara langsung mempengaruhi pemerintah, pemilihan umum dan agenda publik juga mampu menjadi alternatif dalam proses *framing* gerakan sosial.

c) Repertoire

Menurut Tilly dalam Situmorang (2007:14-15), *repertoire* adalah “sebuah penciptaan budaya melalui proses pembelajaran”. Kemudian Tilly secara lebih lanjut menjelaskan *repertoire* adalah sekumpulan alat yang dapat dipergunakan oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai keinginan mereka, seperti menghancurkan fasilitas umum, menyerang tempat tertentu, demonstrasi di jalanan, mengeluarkan petisi, pertemuan formal, dsb.

Pada konsep ini terdapat tiga kategori yang dikembangkan oleh Tilly dalam menjelaskan bagaimana mekanisme konsep ini dijalankan dalam menganalisis sebuah gerakan. *Pertama*, bagaimana *impact* sebuah sistem yang dikembangkan. *Kedua*, reaktif dalam membela hak-hak yang terancam, dan *Ketiga*, proaktif menuntut hak-hak yang belum dinikmati. (Situmorang, 2007:16)

3. Teori Identitas

Menurut Singh (2001), teori berorientasi identitas (*the Identity Oriented Theory*) tentang gerakan sosial kontemporer (*contemporary social movements*) mendeskripsikan asumsi dasar sebagai kritik pada perspektif teori mobilisasi sumberdaya (*the Resource Mobilisation Theory*). Basis rasionalitas dari teori mobilisasi sumberdaya dianggap tidak cukup memadai dalam menjelaskan beberapa ekspresi dari gerakan sosial baru, seperti; gerakan Feminis, gerakan Lingkungan, gerakan damai, gerakan pelucutan senjata, dan gerakan kebebasan lokal.

Teori berorientasi identitas (*the Identity Oriented Theory*) sangat dominan di negara-negara Eropa, sebagai penentang atas penjelasan (eksplanasi) rasionalitas mengenai gerakan sosial kontemporer yang umumnya dirumuskan dan dipraktikkan oleh sarjana-sarjana di Amerika. Dibandingkan dengan teori mobilisasi sumberdaya yang memfokuskan dan terikat secara signifikan dengan rasionalisme dan materialisme, Jadi, teori identitas pada umum mempunyai sifat-sifat non-materialistik dan ekspresif.

Teori identitas membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai solidaritas dan integrasi. Menurut pemikiran teori ini, baik konsep Durkhemian tentang anomie dan gangguan atau pandangan Smelserian tentang ketegangan, keyakinan umum dan sebagainya, dianggap kurang relevan untuk mendeskripsikan mengenai perilaku kolektif. Penyimpangan sosial sebagai gagasan tentang anomia atau gangguan sosial tidak bisa dijadikan ukuran dalam memandang berbagai dimensi terkait gerakan sosial.

Selanjutnya Hunt dan Benford dalam Snow, Soule, & Kriesi (2004), menyebutkan dalam literatur ilmu sosial tentang gerakan, konsep identitas kolektif (*collective identity*) digunakan secara luas. Identitas kolektif dipandang baik sebagai faktor yang diperlukan oleh terciptanya tindakan kolektif maupun sebagai hasil dari gerakan tindakan kolektif. Para peneliti telah menggunakan identitas kolektif dalam berbagai teori dan pada semua level analisis. Identitas kolektif telah menjadi pusat kajian analisis tentang kemunculan gerakan, lintasan gerakan, dan dampak gerakan. Kajian tentang identitas juga masuk ke dalam dimensi analisis konstruksi ketidakpuasan dan proses-proses pembingkaihan (*framing*), motivasi keikutsertaan, pilihan taktik aktivis, hasil, dan emosi (*emotions*). Identitas kolektif tampaknya telah menjadi konsep sentral hampir pada setiap perspektif teoritis dan pertanyaan-pertanyaan empiris yang terkait dengan studi-studi kontemporer gerakan sosial.

Menurut Blumer sebagaimana di sebutkan dalam (Snow, Soule & Kriesi, 2004) mengemukakan bahwa gerakan harus menyulut semangat korps diantara anggota melalui konstruksi *in-group outgroup relationship*, memberikan kesempatan untuk interaksi formal, serta ritual dan seremoni formal organisasi. Hasil mengutip

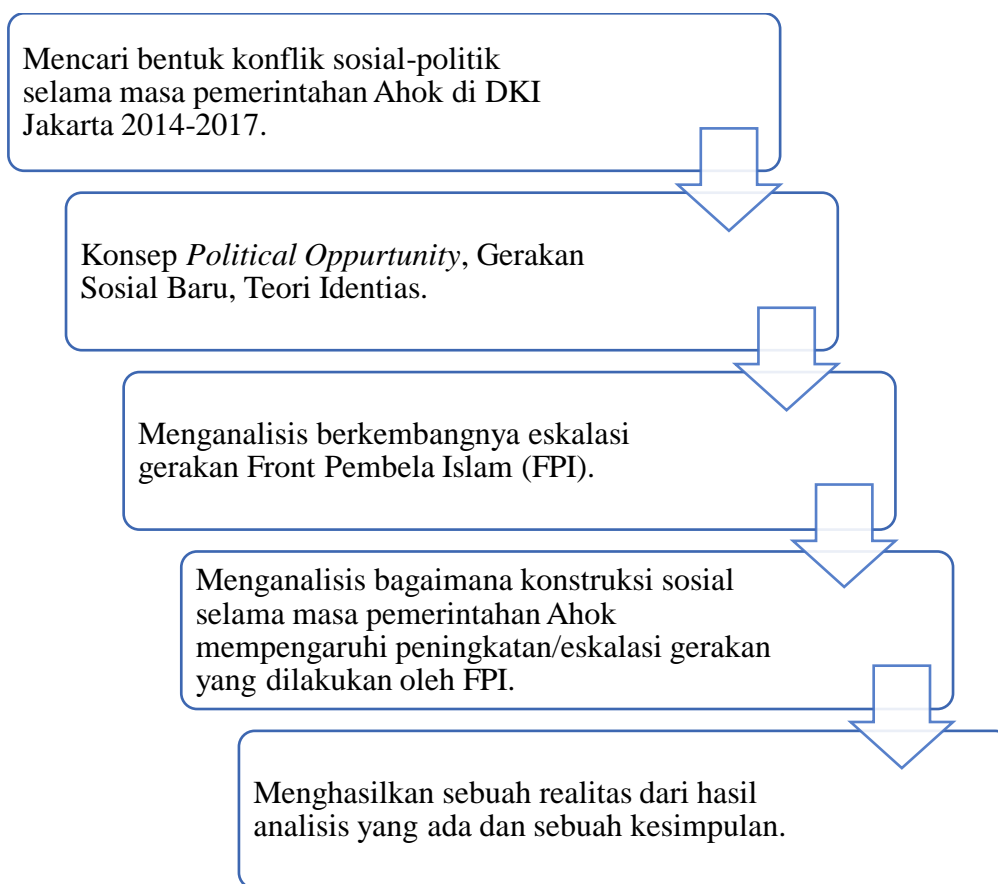
pemikiran Blumer mengantisipasi formulasi mengenai identitas kolektif melalui perhatian terhadap kebutuhan gerakan dalam membangun ideologi dan menyulut perasaan semangat serta energi.

Pendapat-pendapat psikologi, psikologi social dan sosiologi makro tentang identitas kolektif (*collective identity*) pada umumnya menjelaskan bahwa kelompok individu memiliki kepentingan, nilai, perasaan dan tujuan bersama. Identitas kolektif di dalamnya meliputi penekanan komitmen pada individu, penekanan solidaritas pada kolektivitas, serta mengamati secara lebih luas struktur makrososial dan dinamika yang melampaui gerakan kolektivitas, termasuk yang membantu membentuk dan memberikan interest pada konteks politik, simbol kultur, tujuan, dan sebagainya.

Sementara Johnston dan Klandermans (1995) mendefinisikan identitas kolektif (*collective identity*) sebagai saling interaksi dan berbagi yang diciptakan oleh beberapa individu atau kelompok pada tingkat yang lebih kompleks dan memusatkan orientasinya pada tindakan, peluang serta kendala dimana aksi terjadi. Terdapat tiga unsur dalam identitas kolektif, yakni: yang pertama, identitas kolektif sebagai proses yang melibatkan denifisi kognitif tentang tujuan, sarana, dan bidang tindakan; kedua, identitas kolektif adalah sebagai proses yang mengacu kepada jaringan relasi aktif antara actor yang berinteraksi, berkomunikasi (*communicate*), saling mempengaruhi (*influence each other*), negosiasi, dan membuat keputusan (*make decisions*). Bentuk organisasi dan model kepemimpinan, saluran komunikasi, dan teknologi komunikasi merupakan bagian dari jaringan relasi; dan yang ketiga yakni tingkat tertentu dari investasi emosional, yang memungkinkan individu merasakan seperti bagian dari suatu kesatuan

Selanjutnya Polleta dan Jasper (2001), memberikan definisi identitas kolektif sebagai kognitif individu, moral, dan emosional yang dihubungkan dengan masyarakat luas, kategori, atau institusi. Identitas kolektif menunjukkan persepsi tentang status hubungan bersama yang mungkin bersifat imajinasi daripada pengalaman secara langsung, dan dibedakan dari identitas personal, meskipun identitas kolektif merupakan bagian dari identitas personal.

B. Kerangka Pemikiran



Peristiwa dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 pada ibukota DKI Jakarta bukan merupakan awal terjadinya konflik sosial-politik, namun dalam kurun waktu tersebut menjadi awal pergerakan Ormas islam Front Pembela Islam memperlihatkan taringnya untuk ikut andil dalam lingkaran pengendali sosial. Naiknya karir jabatan politik Jokowi Dodo yang saat itu memegang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta mencoba peruntungan dalam kancah politik yang lebih tinggi yaitu ikut dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia. peristiwa tersebut menjadikan partner politiknya saat itu Basuki Tjahaja Purnama yang biasa kita kenal Ahok secara aturan politik menggantikan posisi jabatan yang kosong yaitu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pergantian posisi jabatan tersebut sangat disinggung oleh beberapa elemen masyarakat.

Khususnya adalah Ormas Islam FPI. Peristiwa tersebut dinilai sangat bersinggungan dengan tabiat atau ajaran islam dalam hal pemimpin atau imamah. Oleh karena itu, peristiwa tersebut menciptakan beberapa perselisihan dan Gerakan-gerakan yang identik dengan agama, sosial maupun politik. Melalui beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni gerakan sosial, teori identitas, dan juga teori kritik sosial akan menjadi pisau untuk menganalisis bagaimana proses keadaan sosial-politik saat itu membentuk sebuah peningkatan/eskalasi gerakan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat islam Front pembela islam (FPI) tersebut selama masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI Jakarta 2014-2017. Setelah itu akan nampak realitas kehidupan sosial-politik saat itu lalu membangun kesimpulan yang menghubungkan antara realitas dengan teori melalui paradigma kritis.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	Abdul Hakim Wahid, Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadist.	Jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Simantik terhadap buku karya Habib Rizieq Shihab yang berjudul Dialog <i>FPI-Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> .	- Dalam pergerakan nya FPI tidak murni hanya untuk membela islam tapi juga dalam rangka membela penguasa yang memberikan dukungan di belakangnya, yang menggunakan metode konflik ditengah masyarakat dengan kekerasan atas nama agama yang di praktekan oleh FPI untuk dapat

			mengembalikan kekuasaan mereka kembali.
2.	Azhar Syafaatul Ikhwan, Gerakan Sosial Baru Komunitas Jalanan (Analisis Gerakan Komunitas <i>Street Art</i> Dakwah Dalam Menanggapi Persoalan Hak Asasi dan Kemanusiaan Melalui Media Seni)	Jenis Penelitian Kualitatif, Pendekatan Fenomenologi	<p>- Gerakan yang dilakukan oleh komunitas <i>Street Art Dakwah</i> merupakan suatu gerakan yang mewadahi para <i>Street Artist</i> dari berbagai tempat dan kalangan untuk menyampaikan kebaikan di tembok-tembok jalanan.</p> <p>- Komunitas ini juga sebagai suatu gerakan penyadaran dalam</p>

			<p>merespon suatu permasalahan atau konflik kemanusiaan meliputi hak asasi manusia, kekerasan terhadap suatu golongan, kesenjangan sosial dll</p>
3.	<p>Devi Harahap, Peranan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017</p>	<p>Jenis Metode Studi Kasus, Pendekatan Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Membuktikan bahwa gerakan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam pemilihan kepala daerah dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pemilih psikologis untuk pasangan calon yang didukungnya</p>

			(dalam hal ini adalah calon pasangan Gubernur muslim)
4.	Fitri Silviah, Strategi Humas Front Pembela Islam (FPI) Dalam Memperbaiki Citra Publik Melalui Media Massa	Jenis Penelitian Kualitatif, Deskriptif Analitik	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi yang dilakukan oleh Humas Front Pembela Islam (FPI) dalam melaksanakan kegiatan atau program-program belum terstruktur dengan baik. - Belum adanya upaya untuk mengubah citra negative menjadi citra positif dalam masyarakat
5.	Machfud Syaefudin, Reinterpretasi Gerakan dakwah Front Pembela Islam (FPI)	Jenis Penelitian Kualitatif, Deskriptif Analitik	<ul style="list-style-type: none"> - Menyajikan beberapa fakta dengan memperhatikan interaksi lebih lanjut dan implikasi dari

			gerakan sosial FPI dalam kegiatan dakwah.
6.	Wiradetia Abiyoso, Slamet Thohari. Gerakan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Aksi Bela Islam Tahun 2016 Di Jakarta	Jenis Penelitian Kualitatif, Pendekatan Studi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan FPI tidak murni sebagai Gerakan membela agama - Latar belakang FPI dalam melakukan aksi bela islam dikarenakan adanya unsur kebencian FPI terhadap Basuki Tjahaja Purnama (BTP) karena BTP melarang berbagai macam kegiatan FPI terkait kegiatan keagamaan.